



# LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LAKIP)

**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN 2021**

## KATA PENGANTAR

Atas bimbingan Tuhan Yang Maha Kuasa, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai dapat menyelesaikan Laporan Akuntabilitas Kinerja Tahun 2021 yang merupakan tanggungjawab atas pelaksanaan Tugas Pokok dan Fungsi, serta sebagai alat kendali, penilaian kuantitatif kinerja dan alat pendorong terwujudnya *Good Governance* dan dalam perpektif yang lebih luas, berfungsi sebagai media pertanggungjawaban pemerintah kepada publik.

Secara kuantitatif kinerja aparatur pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dikatakan cukup baik. Hal ini terlihat dari frekwensi prosentase pada analisis pengukuran kinerja dan evaluasi kinerja, sebagaimana yang terbaca dalam uraian Laporan Kinerja ini.

Keberhasilan aplikasi kebijakan, program dan kegiatan dalam pelaksanaan Pelayanan Publik tersebut merupakan konsekuensi logis dari pada perencanaan strategi yang memerlukan integritas antara keahlian sumber daya manusia dan sumber daya lain dalam upaya pencapaian visi dan misi. Keberhasilan tersebut juga dipengaruhi oleh beberapa variabel, diantaranya faktorperencanaan, pelaksanaan, pengawasan dan koordinasi.

Sedangkan kendala-kendala dalam melaksanakan tugas, fungsi dan wewenang sebagaimana tergambar secara tersirat dalam analisis pengukuran kinerja lebih dipengaruhi oleh faktor dana, sumber daya manusia dan sumber daya yang berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLPUS MANGGARANG, S.Fil**

Pembina TIK & V/b

NIP. 196809032000121004

## IKHTISAR EKSEKUTIF

Dengan berpijak pada Visi, Misi, arah kebijakan dan prioritas pembangunan serta memperhitungkan berbagai kemampuan terutama kemampuan keuangan, maka pada tahun 2021 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah berupaya dan bersungguh-sungguh untuk melaksanakan berbagai kebijakan, program dan kegiatan yang diarahkan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran.

Dari evaluasi penyelenggaraan tugas, pokok dan fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021, menunjukkan bahwa dari beberapa kebijakan yang ditetapkan, pada umumnya telah dilaksanakan dengan baik. Program-program dan kegiatan-kegiatan yang telah dilaksanakan untuk mewujudkan tujuan dan sasaran pembangunan, sudah menampakkan hasil yang nyata serta berdampak positif terhadap perkembangan di Kabupaten Manggarai ke depan. Hal ini dapat dilihat pada pelaksanaan kebijakan, program dan kegiatan serta hasil yang telah dicapai selama tahun 2021. Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran 1 Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 159,17% dengan kategori "Memuaskan" dan Sasaran 2 Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 5,67 % dengan kategori "kurang" dengan total rata-rata capaian kedua sasaran adalah 82,42 % dengan kategori 'baik'.

Kami menyadari bahwa ada hambatan-hambatan serta kegagalan-kegagalan yang terjadi. Oleh karena itu, diharapkan agar pembuatan Laporan Kinerja ini sungguh-sungguh merupakan suatu sarana yang dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi bagi pejabat yang berwenang demi perbaikan kinerja pada masa yang akan datang.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLFUS B. MANGGARANG, S.Fil**

Pembina Tk. III/b

NIP. 196809032000121004

## BAB 1 PENDAHULUAN

### A. Gambaran Umum Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

1. Dasar hukum berdirinya Organisasi  
Menindaklanjuti Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 tahun 2019, Tentang Perangkat Daerah Yang Melaksanakan Urusan Pemerintahan Di Bidang Kesatuan Bangsa Dan Politik, Pemerintah Kabupaten Manggarai mengimplementasikannya melalui Peraturan Daerah Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Manggarai. Pasal 2 huruf e angka 5 “ Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Tipe B menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang kesatuan bangsa dan politik”.
2. Tugas Pokok dan fungsi  
Berdasarkan peraturan Bupati Manggarai nomor 52 Tahun 2020 Badan Kesatuan Bangsa Dan Politik Daerah mempunyai tugas dan fungsi antara lain :
  - 1) Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan, membina, mengendalikan pelaksanaan tugas di bidang Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik serta kesekretariatan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah menyelenggarakan fungsi:
    - a. Merumuskan perencanaan bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - b. Menyusun pedoman dan petunjuk teknis bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - c. Menyusun norma, standar, prosedur dan kriteria bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - d. Mengoordinasikan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
    - e. Mengoordinasikan, mengendalikan dan membina pelaksanaan tugas kesekretariatan;

- f. Mengendalikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik;
  - g. Melaporkan pelaksanaan tugas bidang ideologi, wawasan kebangsaan dan ketahanan ekonomi, sosial, budaya, agama, politik dalam negeri dan organisasi kemasyarakatan dan kewaspadaan nasional dan penanganan konflik; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan oleh atasan.
- 2) Sekretariat Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah yang dipimpin oleh Sekretaris, mempunyai tugas melaksanakan pembinaan administrasi yang meliputi urusan perencanaan, evaluasi dan pelaporan, urusan umum dan kepegawaian serta urusan keuangan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Sekretaris mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun rencana operasional sekretariat;
  - b. Menyusun perencanaan program dan kegiatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - c. Mengoordinasikan pelaksanaan hubungan masyarakat dan keprotokolan;
  - d. Mengoordinasikan pelaksanaan urusan umum berkaitan dengan rumah tangga dan penatausahaan aset;
  - e. Mengoordinasikan penatausahaan keuangan;
  - f. Mengoordinasikan pengelolaan kepegawaian;
  - g. Menyusun dokumen evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah; dan
  - h. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.1. Subbagian Program Anggaran dan Keuangan melaksanakan fungsi:
- a. Menyusun rencana kegiatan bidang program anggaran dan mengolah data penyusunan Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;uangan;
  - b. Menyusun Renstra, RENJA, KUA, PPAS, PPA, RKA, DPA, RKT dan PK;
  - c. Mengolah data evaluasi pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah;
  - d. Mengolah data penyusunan laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - e. Menyusun laporan pelaksanaan tugas Badan Kesatuan Bangsa dan Politik berkaitan dengan LKIP, LPPD, LKPJ dan laporan lainnya;
  - f. Melaksanakan penatausahaan keuangan berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran;
  - g. Mengelola daftar gaji dan tunjangan pegawai;
  - h. Menyusun laporan keuangan; dan

- i. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 2.2. Subbagian Umum dan Kepegawaian menyelenggarakan fungsi :
- a. Menyusun rencana kegiatan subbagian umum dan kepegawaian;
  - b. Melaksanakan penatausahaan surat menyurat;
  - c. menyusun dan mengolah data inventarisasi barang milik Negara/Daerah;
  - d. Mengelola urusan perlengkapan dan rumah tangga;
  - e. mengelola urusan kepegawaian berkaitan dengan formasi, mutasi pegawai, pengembangan kompetensi, kesejahteraan pegawai dan disiplin pegawai; dan
  - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3) Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama berkaitan dengan ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama mempunyai fungsi sebagai berikut:
- a. Menyusun program kerja di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - b. Merumuskan kebijakan teknis di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - d. Melaksanakan koordinasi di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;

- e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang ideologi, wawasan kebangsaan, bela Negara, karakter bangsa, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika dan sejarah kebangsaan serta ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan di wilayah kabupaten;
  - f. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3.1 Subbidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan, bela negara, pembauran kebangsaan, bhineka tunggal ika, sejarah kebangsaan dan karakter bangsa;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ideologi dan wawasan kebangsaan;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ideologi dan wawasan kebangsaan; dan
  - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 3.2 Subbidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Agama menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, dan budaya, fasilitasi pencegahan narkoba serta fasilitasi kerukunan umat beragama dan penghayat kepercayaan;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang ketahanan ekonomi, sosial, budaya dan agama; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 4) Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan berkaitan dengan pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan mempunyai fungsi sebagai berikut :
- a. Menyusun program kerja di bidang pendidikan politik, etikabudaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan

mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;

- b. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - c. Melaksanakan kebijakan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - d. Melaksanakan koordinasi di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah;
  - e. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/pemilihan umum kepala Daerah, pemantauan situasi politik serta pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing di wilayah Daerah; dan
  - f. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 1.1 Subbidang Politik Dalam Negeri menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendidikan politik, etika budaya politik, peningkatan demokrasi, fasilitasi kelembagaan pemerintahan, perwakilan dan partai politik, pemilihan umum/ pemilihan umum kepala Daerah, serta pemantauan situasi politik;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang politik dalam negeri;
  - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang politik dalam negeri;
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 1.2 Subbidang Organisasi Kemasyarakatan menyelenggarakan fungsi:
- a. Merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang pendaftaran ormas, pemberdayaan ormas, evaluasi dan mediasi sengketa ormas, pengawasan ormas dan ormas asing;
  - b. Melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang Organisasi Kemasyarakatan;



- c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang Organisasi Kemasyarakatan; dan
  - d. Melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 5) Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai tugas merencanakan, mengoordinasikan dan mengevaluasi pelaksanaan tugas Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik berkaitan dengan kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar Negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik. Dalam melaksanakan tugas pokok tersebut Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik mempunyai fungsi sebagai berikut :
- 1. Menyusun program kerja di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 2. Menyusun bahan perumusan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 3. Melaksanakan kebijakan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 4. Melaksanakan koordinasi di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah;
  - 5. Melaksanakan monitoring, evaluasi, dan pelaporan di bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan, serta penanganan konflik di wilayah Daerah; dan
  - 6. Melaksanakan fungsi lain yang diberikan oleh atasan.
- 5.1 Subbidang Kewaspadaan Dini dan Kerja Sama Intelejen menyelenggarakan fungsi:
- a. merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang kewaspadaan dini, kerjasama intelijen, pemantauan orang asing, tenaga kerja asing dan Lembaga asing, kewaspadaan perbatasan antar negara, serta fasilitasi kelembagaan bidang kewaspadaan;
  - b. melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang kewaspadaan dini dan kerja;
  - c. mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang kewaspadaan dini dan kerja; dan
  - d. melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.

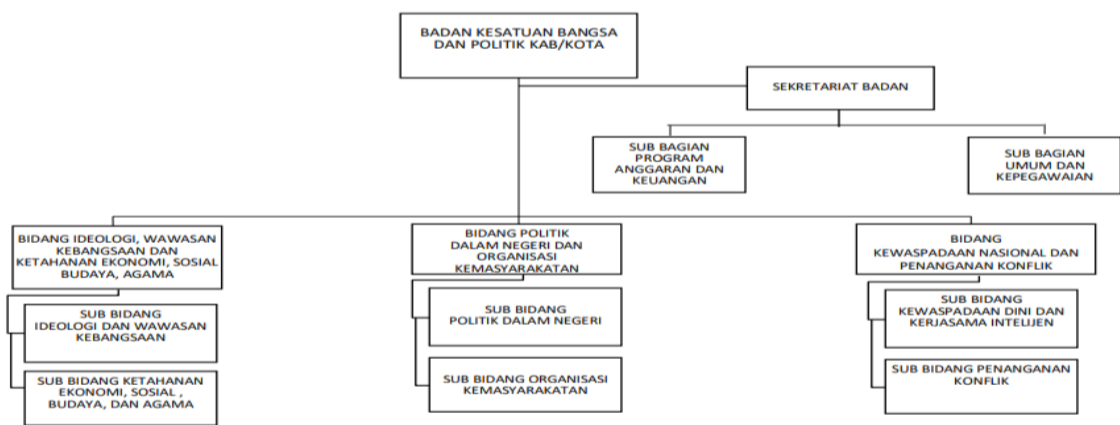
- 5.2 Subbidang Penanganan Konflik menyelenggarakan fungsi:
- merencanakan dan melaksanakan kegiatan bidang penanganan konflik;
  - melaporkan hasil pelaksanaan tugas bidang penanganan konflik;
  - mengevaluasi pelaksanaan kegiatan bidang penanganan konflik;
  - melaksanakan tugas dinas lainnya yang diberikan atasan.
- 6) Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah mempunyai tugas melaksanakan sebagian tugas dinas sesuai keahlian dan kebutuhan. Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang diangkat oleh Bupati atas usulan Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah dan jumlah serta jenis Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**B. Struktur Organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai**

1. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah sesuai Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 100 - 441 Tahun 2019 tanggal 14 Maret 2019 Tentang Nomenklatur Perangkat Daerah yang melaksanakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesatuan Bangsa dan Politik, adalah sebagai berikut :

**Gambar 1.1**  
**Struktur Organisasi**  
**Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai**



2. Kondisi SDM Aparatur

Padatahun2021, jumlah pegawai Pegawai Negeri Sipil pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sebanyak 20 orang. Berikut komposisi pegawai berdasarkan Pangkat dan Golongan:

**Tabel 1.1**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Pangkat dan Golongan Tahun 2021**

No	Jabatan	Golongan					Jumlah
		Non PNS	I	II	III	IV	
1	Kepala Badan	-	-	-	-	1	1
2	Sekretaris	-	-	-	-	1	1
3	Kepala Bidang	-	-	-	-	2	2
4	Kepala Sub Bidang	-	-	-	4	-	4
5	Kepala Sub Bagian	-	-	-	1	1	2
5	Staf	1	1	4	3	1	10
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>1</b>	<b>4</b>	<b>8</b>	<b>6</b>	<b>20</b>

Komposisi Personil berdasarkan jabatan dan kualifikasi pendidikan Lingkup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai sampai dengan tahun 2021 adalah sebagai berikut :

**Tabel 1.2**  
**Komposisi Pegawai Berdasarkan Kualifikasi Pendidikan Tahun 2021**

No	Jabatan	Kualifikasi Pendidikan						Jumlah
		S2	S1	D3	SLTA	SLTP	SD	
1	Kepala Badan	-	1	-	-	-	-	1
2	Sekretaris	-	1	-	-	-	-	1
3	Kepala Bidang	-	2	-	-	-	-	2
4	Kepala Sub Bidang	-	4	-	-	-	-	4
5	Kepala Sub Bagian	1	1	-	-	-	-	2
5	Staf	-	2	-	7	-	1	10
<b>JUMLAH</b>		<b>1</b>	<b>11</b>	<b>-</b>	<b>7</b>	<b>-</b>	<b>1</b>	<b>20</b>

Sementara itu data pegawai pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 adalah seperti yang terdapat dalam tabel 1.3 di bawah ini.

**Tabel 1.3**  
**Data Pegawai Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai**  
**Tahun 2021**

No	Nama	Pendidikan	Jabatan	Pangkat / Gol.
1.	GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL	S-1	KEPALA BADAN	PEMBINA TK. I-IV/b
2.	DRS.BENYAMIN HARUM	S-1	SEKRETARIS	PEMBINA Tk.I-IV/b
3.	DRA. A. SASTRI H. NGAJANG	S-1	KABID DEMOKRATISASI	PEMBINA-IV/a
4.	DRS. PASKALIS B. LEBO	S-1	KABID PMA	PEMBINA-IV/a
5.	MARIA YETSIANA WEA, M.Pd	S-2	KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN	PEMBINA-IV/a
6.	ROBERTUS JEKARUS,ST	S-1	KASUBID HUB. ANTAR LEMBAGA & ORGAN	PENATA TK.I-III/d
7.	FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS	S-1	KASUBID POLITIK	PENATA III/c
8.	LEONARDUS MANJE, SP	S-1	KASUBID PEMILU & PEMATAPAN WASBANG	PENATA III/c
9.	ADELHEID SANUL	SLTA	KASUBAG KEUANGAN	PENATA III/c
10.	AGUSTIANY A. DJAE, SKM	S-1	KASUBAG PEP	PENATA III/c
11	CORDINUS M.MAGUL,SH	S-1	STAF	PEMBINA-IV/a
12	YOSEPH JEHADIN, SH	S-1	STAF	PENATA MUDA TK. I/III b
13	DONATUS JAMAN	SLTA	STAF	PENGATUR TK. I / II d
14	RAIMUNDUS T. YARDI	SLTA	STAF	PENGATUR -II/c
15	FERDINANDUS M. SEDA	SLTA	STAF	PENGATUR TK.I-II/d
16	SIMON SU	SLTA	STAF	PENGATUR TK.I-II/d
17	WILIBRODUS SANI AGUNG	SLTA	STAF	PENGATUR -II/c
18	VINSENSIUS PADU	SLTA	STAF	PENGATUR MUDA TK.I-II/b
19	SIPRIANUS GARUT	SD	STAF	JURU MUDA TK.I-I/b
20	CHRISTOPHORUS HAMI	SLTA	STAF	THL

**BAB II**  
**PERENCANAAN STRATEGIS**

**A. Rencana Strategi Tahun 2016-2021**

Sesuai tugas pokok dan fungsinya, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menyusun rencana strategi yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu lima tahun, yaitu periode tahun 2016–2021 dengan memperhitungkan potensi, peluang, dan kendala yang ada atau mungkin timbul. Rencana strategi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai yang mencakup visi, misi, tujuan dan sasaran serta strategi pencapaian sasaran akan diuraikan dalam bab ini. Sedangkan uraian sasaran target kinerja yang ingin dicapai dalam tahun 2021 berikut program dan kegiatan pendukungnya akan dijelaskan dalam Rencana Kinerja Tahun 2021.

1. Visi dan Penjelasan Makna Visi.

➤ VISI

Visi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah sebagai berikut: **“MASYARAKAT MANGGARAI YANG TERTIB, AMAN, DAMAI DAN KEHIDUPAN BERPOLITIK YANG DEMOKRATIS”**

2. Misi dan penjelasan makna tiap-tiap Misi

➤ MISI

Misi yang dirumuskan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai dalam mencapai Visi adalah sebagai berikut :

- a) Mewujudkan situasi Keamanan yang Kondusif.
- b) Mewujudkan iklim politik yang demokratis.
- c) Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat .

3. Tujuan, Sasaran dan Program.

Tujuan, sasaran dan program tertuang dalam tabel 2.1 berikut ini :

**TABEL 2.1**  
**TUJUAN, SASARAN, DAN PROGRAM TAHUN 2021**

Tujuan	Sasaran	Program
1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan Masyarakat.	1. Meningkatnya komuni-kasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.	1.1.1 Peningkatan Keamanan Dan Kenyamanan Lingkungan
		1.1.2 Pemeliharaan Kantrantibmas dan Pencegahan Tindak Kriminal
		1.1.3 Pemberdayaan Masyarakat untuk menjaga ketertiban dan keamanan
2. Terciptanya kualitas	2.1 Meningkatnya kualitas	2.1.1 Pengembangan Wawasan

penyelenggaraan demokratis dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.	penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	Kebangsaan	
		2.1.	Pendidikan Politik Masyarakat
		2	

## B. Rencana Kinerja Tahunan Tahun 2021

Perencanaan Kinerja merupakan proses penyusunan Rencana Kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis, yang akan dilaksanakan oleh instansi pemerintah melalui berbagai kegiatan tahunan. Penyusunan Rencana Kinerja dilaksanakan seiring dengan agenda penyusunan kebijakan anggaran serta merupakan komitmen bagi instansi untuk mencapainya dalam tahun tertentu. Di dalam Rencana Kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan melalui Penetapan Kinerja Pemerintah Kabupaten Manggarai tahun 2021.

Dokumen Rencana Kinerja Tahunan memuat informasi tentang sasaran yang ingin dicapai dalam tahun yang bersangkutan, Indikator Kinerja Sasaran dan Rencana Capaiannya. Indikator Kinerja adalah ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian tujuan dan sasaran organisasi. Rencana Kinerja Tahunan Pemerintah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 ada pada Lampiran.

## C. Perjanjian Kinerja Tahun 2021

Perjanjian Kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen pimpinan yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun berdasarkan tugas, fungsi dan wewenangserta mempertimbangkan sumber daya yang tersedia. Kinerja yang disepakati dalam PK tidak terbatas pada kinerja yang dihasilkan pada tahun 2021 saja, tetapi termasuk kinerja yang telah dicapai melalui program dan kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian Perjanjian Kinerja tahun 2021juga mencakup *outcome* yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya. Tujuan penyusunan Perjanjian Kinerja adalah :

1. Sebagai wujud nyata komitmen antara penerima dan pemberi amanah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja aparatur.
2. Sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran organisasi dan sebagai dasar pemberian penghargaan dan sanksi.
3. Sebagai dasar bagi pemberi amanah untuk melakukan monitoring, evaluasi dan supervisi atas perkembangan/kemajuan kinerja penerima amanah.
4. Menciptakan tolokukur kinerja sebagai dasar evaluasikinerjaaparatur.

Adapun Perjanjian Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggarai tahun 2021 yang disajikan disini adalah Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021. Substansi perubahan dari Perjanjian Kinerja tersebut adalah terkait adanya proses perubahan APBD Tahun Anggaran 2021 dan dimungkinkan menurut Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, bahwa Perjanjian Kinerja direvisi atau disesuaikan dalam hal terjadi kondisi perubahan dalam strategi yang mempengaruhi pencapaian tujuan dan sasaran (perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran). Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2021 dimaksud, sebagai berikut :

**Tabel 2.2**  
**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2021**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Program/ kegiatan/ Sub Kegiatan	Anggaran
1	2	3	4	5	6
1	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	a. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 kasus	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	327.730.000
		b. Jumlah pengamanan tertutup (PAMTUP)	30 Kali	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial	
				SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	327.730.000
2	Meningkatnya kualitas penyelengaraan demokratisasi (PILPRES, PILKADA, PILEG) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	c. Jumlah peserta sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran	6 kali (600 Peserta)	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya	
				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63,790,000

		masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa			
		d. Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM	250 orang	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	
				Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik	
				Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	592.292.560



### **BAB III**

#### **AKUNTABILITAS KINERJA**

Akuntabilitas kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai adalah perwujudan kewajiban Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai untuk mempertanggungjawabkan keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 tergambar dalam tingkat pencapaian sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan sesuai dengan program dan kebijakan yang ditetapkan.

#### **A. URAIAN HASIL PENGUKURAN KINERJA**

Sebelum menguraikan hasil pengukuran kinerja, perlukiranya dijelaskan mengenai proses pengukuran kinerja terlebih dahulu. Proses pengukuran kinerja didahului dengan penetapan Indikator Kinerja Kejadiannya itu ukuran kuantitatif dan kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung dapat mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator Kinerja Kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output), dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut :

- a. Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi, dan sebagainya.
- b. Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- c. Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan harapan masyarakat.
- d. Manfaat (Benefit) adalah kegunaan suatu keluaran (output) yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Dapat berupa tersedianya fasilitas yang dapat diakses oleh publik.
- e. Dampak (Impact) adalah ukuran tingkat pengaruh sosial, ekonomi, lingkungan atau kepentingan umum lainnya yang dimulai oleh capaian kinerja setiap indikator dalam suatu kegiatan.

Langkah selanjutnya adalah menetapkan rencana tingkat capaian (target) yang kinerja yang diinginkan. Pengukuran kinerja dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasinya melalui media berupa Formulir PK (Pengukuran Kinerja) Untuk mempermudah interpretasi atas capaian sasaran dari program dan kegiatan maka capaian dimaksud dibagi atas 5 (lima) kategori seperti berikut:

**TABEL 3.1**  
**KATEGORI PENILAIAN CAPAIAN INDIKATOR SASARAN**

No.	Capaian Kinerja	Kategori/ Makna
1.	$\geq 100$	Memuaskan
2.	$\geq 85 - 99$	Sangat Baik
3.	$\geq 70 - 84$	Baik
4.	$\geq 50 - 69$	Cukup
5.	$\leq 49$	Kurang

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Rencana Kinerja tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai bagian dari Rencana Kinerja Tahun 2021 untuk mencapai 2 sasaran strategis. Hasil pengukuran kinerja menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja sasaran adalah **82,42%** dengan kategori “baik”.

**B. EVALUASI DAN ANALISIS AKUNTABILITASKINERJA**

Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai tahun 2021 tercermin dalam pencapaian sasaran–sasaran yang dilaksanakan melalui berbagai program dan kegiatan. Pencapaian kinerja seluruh sasaran tahun 2021 adalah sebagai berikut:

**Sasaran 1** : Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa.

Dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 1 program dan 1 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran kinerja Tahun 2021 yang diperbandingan dengan pengukuran kinerja tahun 2016, tahun 2017, 2018, tahun 2019 dan tahun 2020.

Analisis capaian indikator untuk sasaran pertama dapat dilihat pada tabel 3.2 berikut:

TABEL 3.2

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 1 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

No.	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
<i>1</i>	<i>2</i>	<i>3</i>	<i>4</i>	<i>5</i>	<i>6</i>	<i>7</i>	<i>8</i>	<i>9</i>	<i>10</i>	<i>11</i>	<i>12</i>	<i>13</i>	<i>14</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>	<i>15</i>	<i>16</i>	<i>17</i>
1	Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12	18	150%	12	12	100%	12	14	116,66%	12	12	100%	12	11	91,67%	12	19	158,33%
2	Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)	45	28	62%	33	30	90,90%	30	23	76,66%	30	36	120%	30	42	140%	30	48	160,00%
Rata-rata				106%			95,45%			96,66%			110%			115,84%			159,17%
Kategori																	Memuaskan		

**Keterangan :**

T : Target

R : Realisasi

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 159,17% dengan kategori Memuaskan. Capaian ini mengalami peningkatan dari tahun 2016 sebesar 106% menjadi 95,45% pada tahun 2017; Sedangkan pada tahun 2018 mengalami peningkatan dari tahun 2017 (95,45%) pada tahun 2018 (96,66%) dan pada tahun 2019 sebesar 110%. Sementara itu pada tahun 2020 mencapai 115,84% dan juga dengan kategori memuaskan. Indikator pada sasaran 1 terdiri dari 2 indikator sasaran yaitu sebagai berikut :

**a. Kasus yang dimediasi penyelesaiannya.**

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 159,17% dengan kategori Sangat baik. Selama tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah menangani kasus dengan jumlah 19 kasus dari target 12 kasus tahun 2021. Adapun rincian laporan kegiatan mediasi penyelesaian masalah/ konflik sosial Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai seperti tertera pada table 3.3 berikut:

Tabel 3.3

**LAPORAN KEGIATAN MEDIASI PENYELESAIAN MASALAH / KONFLIK SOSIAL OLEH BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KAB. MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>NO</b>	<b>TANGGAL</b>	<b>PENYELESAIAN MASALAH SOSIAL</b>	<b>KETERANGAN</b>
1	06 Januari 2021	Penyelesaian masalah tanah Pustu Pau, Kec. Langke Rembong	Selesai Mimediiasi
2	14 Februari 2021	Penyelesaian masalah kelangkaan pupuk terkait pemanggilan tuan Toko Tani an. Bapak Robert Junaedi sebagai distributor pupuk UREA Kaltim dan tuan toko Sejati an. Bapak Hendrik Kustionardi dari CV. Tani Mandiri yang menyediakan pupuk Ponska, ZA, SP36, PETROGAMI. Yang menjadi masalah adalah jenis pupuk NPK PONSKA stoknya selalu kurang karena kuota yang disiapkan pemerintah selalu sedikit.	Selesai Penanganan dan tetap dalam pemantauan
3	15 Februari 2021	Penyelesaian masalah terkait Ditemukannya sebuah Kapal yang mengangkut sapi ilegal antar pulau tanpa melalui pos karantina di Kedindi, Kec. Reok, yang akan dibawah ke NTB	Selesai Penanganan
4	23 Februari 2021	Penyelesaian masalah tanah Jembatan Wae Kuli II, Desa Lemarang, Kec. Reok Barat	Selesai dimediiasi
5	22 Februari 2021	Penyelesaian masalah penyerobotan tanah oleh warga Desa Cambir Leca, an. Anton Taruk dan Petrus Ndali di Dusun Ramut, Desa Terong, Kec. Satar Mese Barat. Ctt : Kesbangpolda melakukan mediasi dilapangan sebanyak 5 (lima) kali	Selesai Penanganan dan tetap dalam pemantauan
6	10 Maret 2021	Penyelesaian masalah tanah antar warga Gendang Nao dengan ahli waris dari Bapak Alm. Paulus Ntunu dan ahli waris dari Bapak Alm. Mateus Mbouk, di Lingko Mbelang, Desa Nao, Kec. Satar Mese Utara	Selesai Penanganan dan tetap dalam pemantauan
7	15 Maret 2021	Penyelesaian masalah hama belalang dan ulat bulu yang menyerang tanaman jagung masyarakat Desa Terong, Kec. Satar Mese Barat. Luas areal yang di serang hama sebesar 70 Hektar dimana 60 Hektarnya merupakan program Gubernur NTT dan 10 Hektarnya adalah lahan masyarakat.Ctt : Kesbangpolda turun ke lapangan sebanyak 2 (dua) kali	Selesai penangananya
8	17 Maret 2021	Penyelesaian masalah persekutuan doa dari salah seorang pendeta di Wae Koe, Desa Legu, Kec. Satar Mese, dengan perantaraan saudara Eben Pareres (anggota Sat.Pol.PP Kabupaten Manggarai)	Belum selesai penangananya dan masih dalam pemantauan
9	27 Maret 2021	Penyelesaian masalah prokontra pengembangan listrik PLTU Ulumbu di Desa Lungar dan Desa Mocok, Kec.	Selesai penanganan dan

		Satar Mese, berupa pengeboran 11 (sebelas) Sumur Baru dengan kapasitas F6 Mega Watt. Ctt : Kesbangpolda melakukan mediasi sebanyak 2 (dua) kali	masih dalam pemantauan
10	30 Maret 2021	Penyelesaian masalah atas laporan masyarakat dari Desa Denge, Kec. Satar Mese Barat terkait adanya praktek Keagamaan / Ritual yang dipimpin oleh Bapak Sales Mon (seorang guru ASN) yang mengajar di SDK Lengos, Dusun Denge yang kegiatannya meresahkan masyarakat	Selesai penanganan dan masih dalam pemantauan
11	08 April 2021	Penyelesaian masalah pengelolaan dana APBDs dari Desa Benteng Tubi oleh Kepala Desa Purna Bhakti periode 2014 s/d 2019, yang dinilai tidak sesuai dengan prosedur. Rapat penyelesaiannya bertempat di Ruang Ulumbu, Kantor Bupati Manggarai yang dipimpin oleh Asisten I Setda dan OPD terkait	Selesai Penanganan
12	12 April 2021	Penyelesaian Masalah tanah Lingko Tagol, Desa Cumbi , Kecamatan Ruteng. Antara Gendang Cumbi Mese dengan Gendang Wakat/ Niang Dopo. Ctt. Kesbangpolda turun melakukan mediasi di lapangan sebanyak 4 ( empat) kali.	Belum selesai masih dalam pemantauan
13	16 April 2021	Penyelesaian masalah dari Aksi Damai Aliansi Masyarakat Bersuara (AMARA) di Kantor Desa Buar, Kec. Rahong Utara, atas ketrerlambatan pencairan BLT tahun anggaran 2021 transparansi pengelolaan Dana Desa	Selesai Penanganan
14	18 April 2021	Penyelesaian Masalah OTT NARKOBA dengan inisial L.RT, di Karot, Kelurahan Tadong. Dalam kasus ini OTT Narkoba golongan B jenis Tembakau Gorila dengan berat 10, 46 gram. Kasusnya sudah di P21 dan segera disidangkan.	Selesai penanganan
15	10 Juni 2021	Penyelesaian masalah tanah Sekolah SDN Romang, Desa Kajong, Kecamatan Reok Barat antara warga Kampung Kalo dan Maras dengan warga Kampung Mbang, Desa Nggalak, Kecamatan Reok Barat	Selesai Penanganan
16	6 Juli 2021	Penyelesaian Masalah tanah Lingko Tagol, Kecamatan Ruteng antara tua Gendang Dalo atas nama Kristoforus Kenan dan Rofinus Lapu. Masalah penggarapan tanah yang melewati batas dari Lingko Gendang Dalo	Selesai dalam pemantauan
17	4 s/d 6 September 2021	Masalah penimbunan minyak tanah dan kelangkaan minyak tanah di Kab. Manggarai . kesbangpolda, Satuan Intekam Polres, Unit Intel Kodim 1612 Manggarai melakukan pemantauan dan konfirmasi dengan beberapa agen minyak tanah yang ada di kota Ruteng serta Berkoordinasi dengan PERTAMINA Reo.	Sudah mediasi tetap dalam pemantauan
18	20 September	Masalah tanah antara Gendang Lenggo Meda dengan	Sudah mediasi

	2021	Gendang Nampo, Desa Golo Woi, Kec. Cibai Barat. Dengan melibatkan 8 (delapan) Lingko	tetap dalam pemantauan
19	27 s/d 28 Oktober 2021	Masalah ERPAK di Kedindi, Reo, Kelurahan Wangkung, Kec. Reok antara saudara Nober Nabu, dkk dengan Pemkab Manggarai yang terjadi sudah lama dan sampai saat ini belum tuntas	Belum tuntas

**b. Jumlah Pengamanan Tertutup (Pamtup)**

Capaian indikator ini pada tahun 2021 sebesar 160% jika dibandingkan dengan tahun 2020 yang hanya sebesar 140 %. Selama tahun 2021, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai telah melakukan Pengamanan Tertutup (Pamtup) dengan jumlah 48 PAMTUP dari target 30 PAMTUP dengan rincian sebagai berikut :

**Tabel. 3.4**  
**Pengamanan Tertutup Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021**

NO	URAIAN
1	PAMTUP Tahun baru Masehi 2021,tanggal 01 Januari 2021
2	PAMTUP Pemantauan situasi Kantrantibmas menjelang dan saat perayaan tahun baru imlek 1272 tanggal 11 s/12 februari 2021
3	PAMTUP pelaksanaan kegiatan serah terima Jabatan dan Purna tugas Bupati dan Wakil Bupati 2016-2021,tanggal 17 Februari 2021 di Aula Ranaka Kantor Bupati Manggarai
4	PAMTUP kegiatan penjemputan dan peneriaan secara resmi Bupati dan Wakil Bupati Manggarai periode 2021-2026 di Wae Reno Desa Ranaka,Kantor Bupati Manggarai 1 hari tanggal 28 Februari 2021
5	PAMTUP Hari Raya Asra Miraj tahun 2021 tanggal 11 Maret 2021
	PAMTUP Hari Raya Nyepi tanggal 14 Maret 2021
6	PAMTUP Misa Kamis Putih,tanggal 01 April 2021
7	PAMTUP Misa Minggu Daun-Daun (Minggu Palma) tanggal 28 Maret 2021 di Wilayah Kec.Langke Rembong
8	PAMTUP Misa Jumat Agung,Sabtu Suci dan Minggu Paska,tanggal 02 s/d 04 April 2021 di Wilayah Kec.Langke Rembong
9	PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai,GMNI di Kapolres Manggarai tanggal 30 Maret 2021
10	PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai dari Forum Masyarakat peduli Desa mata Wae Kec.Satar Mese Utara di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai,tanggal 15 April 2021
11	PAMTUP hari Buruh SE-Dunia yang di peringtkan setiap tanggal 01 Mei yang di pusatkan Kota Ruteng Kec.Langke Rembong tanggal 01 Mei 2021

12	PAMTUP kegiatan Aksi Unjuk Rasa Damai dari Aliansi Mahasiswa yang terhimpun dari Organisasi PMKRI,tanggal 03 Mei 2021
13	PAMTUP Ibadah hari raya kenaikan Isah Almasih dan hari raya Idul Fitri 1442 H,di kota Ruteng Kec.Langke Rembong,tanggal 12 s/d 14 Mei 2021
14	PAMTUP kebakaran SPBU Mena,Kelurahan Bangka Tuke,Kec.Langke Rembong,tanggal 10 Mei 2021
15	PAMTUP Aksi Unjuk Rasa Damai dari Aliansi Manggarai Bergerak (MAGER) di Kec.Langke Rembong,tanggal 31 Mei 2021
16	PAMTUP Peringatan Hari Kelahiran Pancasila,tanggal 01 Juni 2021
17	PAMTUP Peringatan Hari Raya Tri Suci Waisak 2565 di Wilayah Kec.angke Rembong,tanggal 26 Mei 2021
18	PAMTUP Hari Raya Idul Adha 1442 Hijriah di Kec.Langke Rembong,tanggal 20 Juli 2021
19	PAMTUP Hari Raya Tahun Baru 1443 Hijriyah,tanggal 11 Agustus 2021
20	PAMTUP Hari Raya Proklamasih Kemerdekaan RI ke.76 diwilayah Kec.Langke Rembong,tanggal 16 s/d 17 Agustus 2021
21	PAMTUP pelaksanaan ujian CPNSD Kab.Manggarai,tanggal 21 s/d 23 September 2021,di Kec.Langke Rembong
22	PAMTUP Hari Raya Maulid Nabi Muhhamad Saw 1443 H,tanggal 20 Oktober 2021
23	PAMTUP Harga Sembako sebagai akibat Covid 19,pada wilayah kecamatan Langke Rembong, tgl 16 s/d 18 September 2021
24	PAMTUP Tabisan Imam Baru Keuskupan Ruteng,tgl 13 s/d 14 November 2021
25	PAMTUP Ketersedian Sembako menjelang Natal 2021 dan tTahun Baru 2022,tanggal 2 s/d 4 November 2021
26	PAMTUP menjelang pelantikan sumpah Jabatan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kab.Manggarai selama 2 hari tanggal 19 s/d 20 November 2021
27	PAMTUP Perayaan Natal 2021 diwilyah Kecamatan Langke Rembong selama 4 hari dari tanggal 23 s/d 26 Desember 2021
28	PAMTUP Perayaan Penutupan Tahun 2021 dan menjelang Tahun Baru 2022 diwilyah Kecamatan Langke Rembong selama 2 hari tanggal 30 s/d 31 Desember 2021
29	PAMTUP Kegiatan Demo Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia Cabang Manggarai dalam aksi seruan Moral memperingati Hari Ibu selama 1 Hari tanggal 22 Desember 2021

➤ Data Demonstrasi / aksi unjuk rasa tahun 2021

Pada Tahun 2021 ada beberapa aksi demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi di Kabupaten Manggarai. Adapaun data Demonstrasi/ Unjuk rasa yang terjadi pada tahun 2021 dapat dijelaskan pada table 3.5 berikut.

Tabel 3.5

LAPORAN DEMO/ AKSI UNJUK RASA YANG DILAKUKAN PAMTUP OLEH BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TA. 2021

NO	TANGGAL	PENANGANAN MASALAH DEMONSTRASI	KET.
1	30 Maret 2021	Penanganan Demonstrasi GMNI Cabang Ruteng Di Polres Dan DPRD Manggarai tentang perbuatan asusila yang diduga oleh seorang anggota polisi Polres Manggarai	Selesai dan tuntas
2	15 April 2021	Demonstrasi dari FORUM MASYRAKAT PEDULI DESA MATA WAE Kec. Satar Mese Utara di Kantor DPRD Manggarai dan Kantor BUPATI Manggarai tentang masalah benang tenus yang pengadaannya tidak sesuai keinginan masyarakat yang pengadaannya dilakukan oleh PLT. Kepala Desa Mata Wae . Demonstrasi ini di mediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD terkait	Selesai dan tuntas
3	16 April 2021	Demonstrasi Aliansi Masyarakat Bersuara Desa Buar, Kec. Rahong Utara tentang keterlambatan pencairan BLT dan transparansi pengelolaan dana desa	Selesai dan tuntas
4	03 Mei 2021	Demonstrasi memperingati Hari Buru yang dilakukan oleh PMKRI dan GMNI cabang Ruteng di Kantor DPRD dan Kantor Bupati Manggarai. Demonstrasi ini dimediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD terkait	Selesai dan tuntas
5	31 Mei 2021	Demonstrasi damai PMM (Pergerakan Masyarakat Manggarai) dari Reo. Sasaran Demonstrasi adalah Bupati Manggarai dan Kepala Dinas Sosial tentang dugaan penggelapan Dana Bansos BPNT (Bantuan Pangan Non Tunai). Demonstrasi ini dimediasi oleh Wakil Bupati Manggarai dan OPD Terkait	Selesai dan tuntas
6	22 Desember 2021	Demonstrasi GMNI Dalam Rangka Memperingati Hari Ibu, lokasi demonstrasi adalah: a) Dinas PPO di mediasi oleh Kepala Dinas PPO b) Kantor Bupati tidak ada mediasi c) Polres Manggarai tidak ada mediasi d) Kantor DPRD Manggarai di mediasi oleh anggota DPRD Manggarai an. Bapak Fabianus Abu dapil Wae Ri'i dan Rahong Utara dari Partai NASDEM	Selesai dan tuntas



Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 1 dengan target anggaran Rp. 327.730.000,- dan realisasinya Rp. 326.730.000,- (99,69% ).Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.6 berikut :

**Tabel 3.6**  
**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 1**  
**MENINGKATNYA KOMUNIKASI DAN DIALOG YANG KONSTRUKTIF ANTARA ANGGOTA**  
**MASYARAKAT DALAM PENYELESAIAN PERSOALAN KEMASYARAKATAN DEMI MENJAGA**  
**PERSATUAN DAN KESATUAN BANGSA**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah Kasus yang dimediasi penyelesaiannya	19	12	158,33%
Jumlah Pengamanan Tertutup	48	30	160%
<b>Rata-Rata</b>			159,17%
<b>Kategori</b>			<b>MEMUASKAN</b>

## 2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 1

Adapun akuntabilitas sasaran I dapat dijelaskan pada Tabel 3.7 berikut ini :

**Tabel 3.7**  
**AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN I**

Sasaran/ Program/ Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
Sasaran 1 : <i>Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa</i>	327.730.000	326.730.000	99,69
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL			
KEGIATAN : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pelaksanaan Pemantapan Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Sosial			
SUB KEGIATAN : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Kewaspadaan Dini, Kerjasama Intelijen, Pemantauan Orang Asing, Tenaga Kerja Asing dan Lembaga Asing, Kewaspadaan Perbatasan Antar Negara, Fasilitasi Kelembagaan Bidang Kewaspadaan, serta Penanganan Konflik di Daerah	327.730.000	326.730.000	99,69

**Sasaran 2** : Meningkatkan kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaranwarga Negara dalamberpartisipasipolitik serta peningkatan kerukunan umat beragama maka dalam usaha mencapai sasaran ini, Badan Kesatuan Bangsa dan Politik

Daerah Kabupaten Manggarai menetapkan 1 kebijakan yang dijabarkan dalam 2 program dan 2 kegiatan dengan 2 indikator kinerja pencapaian sasaran. Pencapaian target kinerja seperti nampak dalam table berikut ini:

1. Pengukuran Kinerja Tahun 2021 yang diperbandingan pengukuran kinerja tahun 2016 sampai dengan tahun 2020. Analisis capaian kinerja indikator sasaran kedua dapat dilihat pada tabel 3.8 berikut :

Tabel 3.8

## ANALISIS CAPAIAN INDIKATOR SASARAN 2 DAN PERBANDINGANNYA DENGAN PENCAPAIAN TAHUN SEBELUMNYA

No	INDIKATOR SASARAN	Tahun 2016			Tahun 2017			Tahun 2018			Tahun 2019			Tahun 2020			Tahun 2021		
		T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%	T	R	%
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20
1.	Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	1200 org	1.200 org	100 %	700 org	700 org	100%	600 org	472org	78,66%	600 org	150 org	25%	600 org	0	0	600 org	20 org	3,33%
2.	Jumlah peserta sosialisasi politik, Undang-Undang Politik dan HAM.	300 org	300 org	100 %	200 org	200 org	100%	250 org	200	80%	250 org	50 org	20%	250 org	0	0	250 org	20 org	8%
Rata-rata				100 %			100%			79,33%			22,50%			0			5,67%
Kategori		<b>KURANG</b>																	

Rata-rata capaian dari kedua indikator sasaran adalah 5,67% dengan kategori **Kurang**. Hal ini sangat berbeda jika dibandingkan dengan capaian kinerja pada tahun 2016 dan tahun 2017 yang mencapai target 100%, pada tahun 2018 sebesar 79,33 % dan pada tahun 2019 sebesar 22,50%. Akan tetapi mengalami peningkatan jika dibandingkan dengan tahun 2020 hanya sebesar 0%.

Anggaran untuk pelaksanaan 2 (dua) indikator sasaran pada sasaran 2 dengan target anggaran **Rp.656.082.560,-** dan realisasinya **Rp. 641.654.320,- (97,80%)**. Jika dibandingkan dengan target RPJMD, maka capaiannya dapat dilihat pada tabel 3.9 berikut :

**Tabel 3.9**

**PERBANDINGAN REALISASI TAHUN 2021 DENGAN TARGET AKHIR RENSTRA SASARAN 2  
MENINGKATNYA KUALITAS PENYELENGGARAAN DEMOKRATIS (PILPRES, PILKADA, PILEG) DAN  
KESADARAN WARGA NEGARA DALAM BERPARTISIPASI POLITIK**

INDIKATOR KINERJA	REALISASI 2021	TARGET AKHIR RENSTRA	CAPAIAN
Jumlah peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa dan penguatan pusat pendidikan wawasan kebangsaan	20 Orang	600 Orang	3,33 %
Jumlah peserta sosialisasi politik/ penyuluhan, Undang-Undang Politik dan HAM	20 Orang	250 Orang	8 %
Rata-Rata			5,67%
<b>Kategori</b>			<b>KURANG</b>

**2. Akuntabilitas Keuangan Sasaran 2**

Adapun akuntabilitas sasaran 2 dapat dijelaskan pada Tabel 3.10 berikut ini :

**Tabel 3.10**

**AKUNTABILITAS KEUANGAN SASARAN 2**

Sasaran/Program/Kegiatan	Anggaran	Realisasi	%
<b>Sasaran2 :</b> <i>Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan kesadaranwarga negara dalam berpartisipasi politik</i>	656.082.560	641.654.320	97,80
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA			
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial dan Budaya			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi di Bidang Ketahanan Ekonomi, Sosial, Budaya dan Fasilitasi Pencegahan Penyalagunaan Narkotika, Fasilitasi Kerukunan Umat Beragama dan Penghayat Kepercayaan di Daerah	63,790,000	63,790,000	100 %

PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK			
Kegiatan : Perumusan Kebijakan Teknis dan Pemantapan Pelaksanaan Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik			
Sub Kegiatan : Pelaksanaan Koordinasi Di Bidang Pendidikan Politik, Etika Budaya Politik, Peningkatan Demokrasi, Fasilitasi Kelembagaan Pemerintahan, Perwakilan dan Partai Politik, Pemilihan Umum/Pemilihan Umum Kepala Daerah, serta Pemantauan Situasi Politik di Daerah	592.292.560	577.864.320	97,56

Dari Kedua sasaran di atas dapat disimpulkan bahwa Rata-rata Total capaian dari kedua indikator sasaran adalah **82,42%** dengan kategori baik. Hal ini dapat dilihat pada tabel 3.11 di bawah ini :

**Tabel 3.11**  
**TOTAL HASIL PENGUKURAN KINERJA**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	%
1	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	12 kasus	19 kasus	158,33%
		1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	48	30	160%
Rata-Rata					159,17 %
Kategori					<b>MEMUASKAN</b>
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PiLKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa	6 Kali (600 Peserta)	20 orang	3,33%
		2.2. Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM	250 orang	20 orang	8 %
Rata-Rata					5,67%
Kategori					Kurang
<b>Total</b>					<b>82,42%</b>
<b>Kategori</b>					<b>BAIK</b>

### C. REALISASI ANGGARAN

#### 1. Target dan realisasi Belanja Operasi dan Belanja Modal.

Target dan realisasi belanja operasi dan belanja modal pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.12 berikut.

Tabel 3.12

#### TARGET DAN REALISASI BELANJA TIDAK LANGSUNG DAN BELANJA LANGSUNG TA. 2021

Belanja	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Belanja Operasi	3.231.096.147	3.087.856.798	95,57
Belanja Modal	-	-	0.0
Total	3.231.096.147	3.087.856.798	95,57

#### 2. Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis

Target dan realisasi anggaran berdasarkan sasaran strategis pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2021 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.13 berikut.

Tabel 3.13

#### TARGET DAN REALISASI ANGGARAN BERDASARKAN SASARAN STRATEGIS TA. 2021

Sasaran Strategis	Pagu Anggaran	Realisasi	Capaian
Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruksi antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	327.730.000	326.730.000	99,69
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	656.082.560	641.654.320	97,80
<b>Total</b>	<b>983.812.560</b>	<b>968.384.320</b>	<b>98,43</b>

#### 3. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Analisis efisiensi penggunaan anggaran melalui perbandingan antara persentase rata-rata capaian kinerja sasaran dengan persentase penyerapan anggaran, yang dijelaskan sebagai berikut:

- a. Efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran mencapai 100% atau lebih dan persentase penyerapan anggaran kurang dari persentase rata-rata capaian kinerja sasaran.

b. Tidak efisien, jika persentase rata-rata capaian kinerja sasaran kurang dari 100%, dan persentase penyerapan anggaran lebih besar dari persentase rata-rata capaian kinerja. Adapun Analisis efisiensi penggunaan anggaran pada Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai Tahun 2020 dapat dijelaskan seperti pada tabel 3.14 berikut.

**Tabel 3.14**  
**ANALISIS EFISIENSI PENGGUNAAN ANGGARAN TA. 2021**

Sasaran Strategis	% rata-rata capaian kinerja sasaran	Pagu Anggaran	Realisasi	% realisasi anggaran	Ket.
Meningkatnya Komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	159,17	327.730.000	326.730.000	99,69	Efisien
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (Pilpres, Pilkada, Pileg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik	5,67	656.082.560	641.654.320	97,80	Tidak efisien
<b>Rata-rata</b>	82,42	983.812.560	968.384.320	98,43	<b>Tidak efisien</b>

Realisasi penyerapan anggaran seperti pada tabel tersebut di atas merupakan realisasi anggaran pada program-program strategis terhadap pencapaian sasaran. Apabila rata-rata pencapaian sasaran 82,42 % ini dibandingkan dengan realisasi penyerapan anggaran dalam rangka pencapaian sasaran sebesar 98,43 %, menunjukkan adanya *ketidakefisienan* penggunaan anggaran. Hal ini disebabkan adanya *refocussing* kegiatan dalam rangka realokasi anggaran untuk penanganan covid-19. *Refocussing* kegiatan dan realokasi anggaran tersebut tidak diikuti dengan perubahan target kinerja yang ditetapkan dalam dokumen Perjanjian Kinerja. Substansi Perubahan dalam dokumen Perjanjian Kinerja Perubahan hanya mengenai perubahan program, kegiatan dan alokasi anggaran sedangkan target kinerja tetap mengikuti target yang termuat dalam dokumen Renstra Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai 2016-2021.

## BAB IV PENUTUP

Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraimerupakan tindaklanjut atau respon terhadap Permenpan Nomor 53 Tahun 2004 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Review atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraipada tahun 2021 menetapkan 2 sasaran yang ingin diwujudkan/dicapaisesuai dengan Rencana Strategis (Renstra) tahun 2016-2021.Dua sasaran tersebut adalah Sasaran 1 yakni meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa dan Sasaran 2 yakni meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi politik.

Berdasarkan hasil pengukuran kinerja Tahun 2021 menunjukkan bahwa rata-rata capaian kinerja dari 2 (dua) sasaran yakni sasaran I Program Kegiatan Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan demi menjaga persatuan dan kesatuan bangsa, yaitu sebesar 159,17% dengan kategori “Memuaskan” dan Sasaran 2 Program Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik, yakni sebesar 5,67 % dengan kategori “kurang”. Total rata-rata kedua sasaran tersebut adalah 82,42 % dengan kategori ‘baik’.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah KabupatenManggaraiini disampaikan untuk menjadi bahan evaluasi dan tindak lanjut sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Ruteng, 18 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLINS BANGGARANG, S.Fil**  
Pembina TIK & I/6  
NIP. 196809032000121004



**MATRIKS RENCANA STRATEGIK BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN 2016 - 2021**

Instansi : Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah  
 Visi : Masyarakat Manggarai yang Tertib, Aman, Damai dan Kehidupan Berpolitik yang Demokratis  
 Misi : 1. Mewujudkan situasi keamanan yang kondusif  
 2. Mewujudkan Iklim Politik yang demokratis  
 3. Mewujudkan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai persatuan dan kesatuan dalam keragaman suku, agama, ras, budaya dan adat istiadat

Tujuan	Sasaran		Target						Cara Mencapai Tujuan dan Sasaran		Penanggungjawab
	Uraian	Indikator Kinerja	2016	2017	2018	2019	2020	2021	Kebijakan	Program	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	5	6
1.1. Meningkatnya rasa aman, damai dalam kehidupan berbangsa dan bernegara	1.1.1. Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antar anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	1.1.1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya 1.1.1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP) 1.1.1.3. Jumlah kegiatan sosilaisasi pencegahan penyakit masyarakat (PEKAT)	12 kasus 45 kali 6 kali	12 kasus 33 kali 0	12 kasus 30 kali 0	12 kasus 30 kali 0	12 kasus 30 kali 0	12 kasus 30 kali 0	Kerjasama dan koordinasi dengan aparat keamanan, satuan perlindungan masyarakat dalam melakukan pengamanan dilokasi konflik dan pelaksanaan Pemilu	1. PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik
2.1. Terciptanya kualitas penyelenggaraan demokrasi dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1.1. Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	2.1.1.1. Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya bangsa	12 kali 1.200 Peserta	7 kali 700 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	6 kali 600 Peserta	1. Memberikan informasi permasalahan dibidang kesatuan bangsa, politik dan perlindungan 2. Memfasilitasi Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB), Forum Kewaspadaan Dini Masyarakat (FKDM), Forum Pembauran Kebangsaan (FPK) dan Penguatan Pusat Pendidikan Wasbang (PPWK)	1. PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL DAN 2. PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN	Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama
		2.1.1.2. Jumlah peserta sosilaisasi Undang-undang Politik dan Ha-hak Asasi Manusia (HAM)	300 orang	200 orang	250 orang	250 orang	250 orang	250 orang	1. Memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kesatuan Bangsa, Politik dan Perlindungan Masyarakat  2. Pembinaan terhadap organisasi Kemasyarakatan (ORMAS) dan Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM)	1. PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK 2. PROGRAM PEMBERDAYAAN DAN PENGAWASAN ORGANISASI KEMASYARAKA	Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21 281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

NO.	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	2	3	4
1.	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan Kemasyarakatan	1.1. Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya 1.2. Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	12 kasus 30 kali
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, Pilkada, PiLeg) dan Kesadaran warga Negara dalam berpartisipasi Politik	2.1. Jumlah Peserta sosialisasi kehidupan beragama, solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa 2.2. Jumlah peserta sosialisasi Politik, Undang-undang Politik dan HAM	6 Kali 600 Peserta 250 Orang
PROGRAM/KEGIATAN		ANGGARAN (Rp.)	KETERANGAN
PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL		Rp 944,695,000	DAU APBD II
PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA		Rp 63,790,000	DAU APBD II
PROGRAM PENGUATAN IDEOLOGI PANCASILA DAN KARAKTER KEBANGSAAN		0	-
PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK		Rp 607,227,560	DAU APBD II
<b>Jumlah</b>		<b>Rp 1,615,712,560</b>	

Ruteng, 23 November 2021

Pihak Kedua,

Pihak Pertama,

  
BUPATI MANGGARAI  
HERY BERTUS G. I. NAFIT, SE, MA

KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,  
GONDOLINS MANGGARANG, S.Fil  
Pembina Tk. 3/b  
NIP. 196809052000121004



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21 281 - Ruteng*

---

**PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai  
:  
Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**

Nama : **HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, M.A**  
Jabatan : Bupati Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

Pihak Pertama,

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**



**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.Fil**

Pembina TK. IV/b

NIP. 196809032000121004

Pihak Kedua,



**HERYBERTUS GERADUS LAJU NABIT, SE, MA**





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SEKRETARIS BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

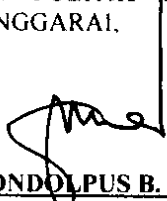
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI.

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

  
**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN UMUM DAN KEPEGAWAIAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **MARIA YETSIANA WEA, M.Pd.**  
NIP : 196709051997022003  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,  
SEKRETARIS BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031

**PIHAK PERTAMA,  
KASUBAG UMUM DAN KEPEGAWAIAN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN  
POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,**

**MARIA YETSIANA WEA, M.Pd.**  
NIP. 196709051997022003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BAGIAN PROGRAM ANGGARAN DAN KEUANGAN BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **AGUSTIANY ALFIRA DJAE, SKM**  
NIP : 19880816 201101 2 014  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Program Anggaran dan Keuangan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP : 19640607 198603 1 031  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Sekretaris Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**SEKRETARIS BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRS. BENYAMIN HARUM**  
NIP. 19640607 198603 1 031

**PIHAK PERTAMA,**  
**KASUBAG PROGRAM ANGGARAN DAN**  
**KEUANGAN BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**AGUSTIANY ALFIRA DJAE, SKM**  
NIP. 19880816 201101 2 014



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP : 19690817 199903 2 007  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN**  
**MANGGARAI,**

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP.196809032000121004**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,**  
**WAWASAN KEBANGSAAN &**  
**KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA, AGAMA BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
**NIP. 19690817 199903 2 007**





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

PERJANJIAN KINERJA BIDANG IDEOLOGI, WAWASAN KEBANGSAAN & KETAHANAN EKONOMI,  
SOSIAL, BUDAYA, AGAMA  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terbentuknya FKUB Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kesadaran Masyarakat Terhadap Kerukunan Hidup Beragama	146 orang
	Terbentuknya FPK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kehidupan Solider di Tengah Masyarakat	344 orang
	Terbentuknya Pokja PPWK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Wasbang	220 orang

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP. 196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG IDEOLOGI,  
WAWASAN KEBANGSAAN &  
KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,  
BUDAYA, AGAMA BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP : 19740415 200701 1 023  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Ideologi dan Wawasan Kebangsaan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP : 19690817 199903 2 007  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Ideologi, Wawasan Kebangsaan dan Ketahanan Ekonomi, Sosial Budaya, Agama Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,**  
**WAWASAN KEBANGSAAN &**  
**KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN**  
**WAWASAN KEBANGSAAN BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

**LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP. 19740415 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN WAWASAN KEBANGSAAN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Pemantapan wawasan kebangsaan dalam rangka menjaga rasa solidaritas dan ikatan sosial di kalangan masyarakat	Terbentuknya FPK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Kehidupan Solider di Tengah Masyarakat	344 orang
	Terbentuknya Pokja PPWK Kab. Manggarai dan Meningkatnya Pemahaman Masyarakat Akan Wasbang	220 orang

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BIDANG IDEOLOGI,**  
**WAWASAN KEBANGSAAN &**  
**KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL,**  
**BUDAYA, AGAMA BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

**DRA. A. SASTRI H. NGAJANG**  
NIP. 19690817 199903 2 007

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA SUB BIDANG IDEOLOGI DAN**  
**WAWASAN KEBANGSAAN BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,**

**LEONARDUS MANJE, SP**  
NIP. 19740415 200701 1 023



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP : 197210232005011006  
Pangkat/Gol. : Penata Tk.I/III d  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Organisasi Kemasyarakatan Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA.**

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA.**

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN**  
**MANGGARAI,**

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI**  
**KEMASYARAKATAN BADAN**  
**KESATUAN BANGSA DAN POLITIK**  
**DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

  
**ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP. 197210232005011006



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

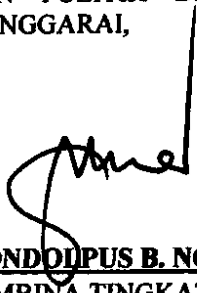
*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG ORGANISASI KEMASYARAKATAN BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021**

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Meningkatnya hubungan antar lembaga/organisasi	Terlaksananya Seminar/Talkshow Ormas dan LSM	30 Ormas / LSM

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG ORGANISASI  
KEMASYARAKATAN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI

  
**ROBERTUS JEKARUS, ST.**  
NIP. 197210232005041006



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS**  
NIP : 19760402 201212 1 003  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Politik Dalam Negeri Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG POI  
DALAM NEGERI BADAN KESA  
BANGSA DAN POLITIK DA  
KABUPATEN MANGGARAI,

**FRANSISKUS SAVERINUS ROS, S**  
NIP. 19760402 201212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG POLITIK DALAM NEGERI  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi laporan keuangan Partai Politik	Jumlah laporan administrasi keuangan parpol yang divalidasi	11 Parpol
	Rapat koordinasi/konsultasi dengan partai politik	3 kali
Terwujudnya penyelenggaraan administrasi penyusunan databesa Partai Politik	Verifikasi administrasi Parpol	1 dokumen (11 Parpol)
	Verifikasi faktual Partai Politik	1 dokumen (11 Parpol)
	Penyuluhan kepada masyarakat	1 kecamatan (50 orang)
	Rapat koordinasi/konsultasi dengan partai politik	2 kali

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA SUB BIDANG POLITIK  
DALAM NEGERI BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

**FRANSISKUS SAVERINUS ROS, SS**  
NIP. 19760402 201212 1 003



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP : 19670517199401 1002  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
NIP : 196809032000121004  
Pangkat/Gol. : Pembina Tk.I/Ivb  
Jabatan : Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

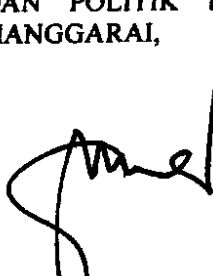
Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

**PIHAK KEDUA,**  
**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA**  
**DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN**  
**MANGGARAI,**

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
**PEMBINA TINGKAT I**  
**NIP.196809032000121004**

**PIHAK PERTAMA,**  
**KEPALA BIDANG KEWASPADAAN**  
**NASIONAL DAN PENANGANAN**  
**KONFLIK BADAN KESATUAN**  
**BANGSA DAN POLITIK DAERAH**  
**KABUPATEN MANGGARAI,**

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
**NIP. 19670517199401 1002**





**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

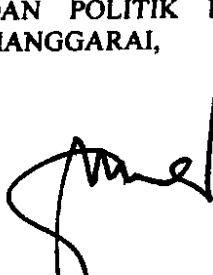
*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 – Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA BIDANG KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENANGANAN KONFLIK**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

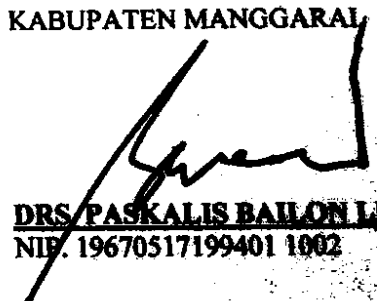
SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
Terwujudnya penyelesaian masalah aktual dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang efektif dan efisien	Jumlah kasus dalam bidang politik yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah kasus dalam bidang ekonomi yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah kasus dalam bidang sosial budaya yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	30 kali
	Terwujudnya FKDM Kab. Manggarai sebagai wadah Deteksi Dini terhadap Gangguan Kantrabtimas di Masyarakat/Potensi Konflik	135 orang

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**GONDOLPUS B. NGGARANG, S.FIL**  
PEMBINA TINGKAT I  
NIP.196809032000121004

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN  
BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,

  
**DRS/PASKALIS BAILON LERO**  
NIP. 19670517199401 1002



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

---

PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN  
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI  
TAHUN ANGGARAN 2021

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel dan berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan berikut ini:

Nama : **ADELHEID SANUL**  
NIP : 196408131986032022  
Pangkat/Gol. : Penata /III c  
Jabatan : Kepala Sub Bidang Kewaspadaan Dini dan Kerjasama Intelijen Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selanjutnya disebut **PIHAK PERTAMA**.

Nama : **DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP : 19670517199401 1002  
Pangkat/Gol. : Pembina/IV a  
Jabatan : Kepala Bidang Kewaspadaan Nasional dan Penanganan Konflik Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Daerah Kabupaten Manggarai

Selaku atasan langsung **PIHAK PERTAMA**, selanjutnya disebut **PIHAK KEDUA**.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja tahunan sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.


Pihak kedua akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan atau sanksi.

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP. 19670517199401 1002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEWASPADAAN DINI DAN  
KERJASAMA INTELIJEN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

  
**ADELHEID SANUL**  
NIP. 196408131986032022



**PEMERINTAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH**

*Jln. Diponegoro Tlp. (0385) 21281 - Ruteng*

**PERJANJIAN KINERJA SUB BIDANG KEWASPADAAN DINI DAN KERJASAMA INTELIJEN**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**  
**TAHUN ANGGARAN 2021**

<b>SASARAN</b>	<b>INDIKATOR KINERJA</b>	<b>TARGET</b>
Terwujudnya penyelesaian masalah aktual dalam bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya yang efektif dan efisien	Jumlah kasus dalam bidang politik yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah kasus dalam bidang ekonomi yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah kasus dalam bidang sosial budaya yang dimediasi penyelesaiannya	4 kasus
	Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	30 kali
	Terwujudnya FKDM Kab. Manggarai sebagai wadah Deteksi Dini terhadap Gangguan Kantrabtimas di Masyarakat/Potensi Konflik	135 orang

Ruteng, 23 November 2021

PIHAK KEDUA,  
KEPALA BIDANG KEWASPADAAN  
NASIONAL DAN PENANGANAN  
KONFLIK BADAN KESATUAN BANGSA  
DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN  
MANGGARAI,

  
**DRS. PASKALIS BAILON LEBO**  
NIP. 196705171994011002

PIHAK PERTAMA,  
KEPALA KEWASPADAAN DINI DAN  
KERJASAMA INTELIJEN BADAN  
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK  
DAERAH KABUPATEN MANGGARAI,

  
**ADELHEID SANUL**  
NIP. 196408131986032022

**PENGUKURAN KINERJA TAHUN 2021**  
**BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH KABUPATEN MANGGARAI**

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET	REALISASI	%	
1	2	3	4	5	6	7	
1	Meningkatnya komunikasi dan dialog yang konstruktif antara anggota masyarakat dalam penyelesaian persoalan kemasyarakatan	1.1	Jumlah kasus yang dimediasi penyelesaiannya	Kasus	12 kasus	19 kasus	158.33
		1.2	Jumlah Pengamanan Tertutup (PAMTUP)	Kali	30 kali	48 kali	160.00
	<b>Rata-rata Sasaran 1</b>						<b>159.17</b>
<b>Predikat</b>						<b>Memuaskan</b>	
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan demokratis (PilPres, PilKada, PiLeg) dan kesadaran warga negara dalam berpartisipasi politik	2.1	Jumlah kegiatan sosialisasi toleransi dan kerukunan dalam kehidupan beragama, rasa solidaritas dan ikatan sosial dikalangan masyarakat dan kesadaran masyarakat akan nilai-nilai luhur budaya Bangsa	orang	600 orang	20 orang	3.33
		2.2	Jumlah peserta sosialisasi Undang-undang Politik dan HAM	orang	250 orang	20 orang	8
	<b>Rata-rata Sasaran 2</b>						<b>5.67</b>
<b>Predikat</b>						<b>Kurang</b>	
<b>Rata-rata Sasaran 1 + 2</b>						<b>82.42%</b>	
<b>Predikat</b>						<b>baik</b>	

NO	PROGRAM	ANGGARAN (Rp)	KET	REALISASI	%
1	PROGRAM PENINGKATAN KEWASPADAAN NASIONAL DAN PENINGKATAN KUALITAS DAN FASILITASI PENANGANAN KONFLIK SOSIAL	327,730,000	APBD	326,730,000	99.69
2	PROGRAM PEMBINAAN DAN PENGEMBANGAN KETAHANAN EKONOMI, SOSIAL, DAN BUDAYA	63,790,000	APBD	63,790,000	100.00
3	PROGRAM PENINGKATAN PERAN PARTAI POLITIK DAN LEMBAGA PENDIDIKAN MELALUI PENDIDIKAN POLITIK DAN PENGEMBANGAN ETIKA SERTA BUDAYA POLITIK	592,292,560	APBD	577,864,320	97.56
<b>TOTAL</b>		<b>983,812,560</b>	<b>APBD</b>	<b>968,384,320</b>	<b>98.43</b>

Ruteng, 4 Januari 2022

**KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DAERAH  
KABUPATEN MANGGARAI,**



**GOMBOLUS BANGGARANG, S.Fil**  
Pembina P.K. & P. b  
NIP. 196809032000121004